

## PROGRAM MAHASISWA PENDAMPING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEBAGAI *SUPPORTING* GURU PEMBIMBING KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSI KOTA SURAKARTA

Munawir Yusuf, Fadjri Kirana Anggarani, Dian Atnantomi Wiliyanto, Mahardika Supratiwi

Pusat Studi Difabilitas, Universitas Sebelas Maret

munawiryusuf@staff.uns.ac.id

### Abstrak

Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Surakarta merupakan UPT yang membawahi layanan sekolah inklusi di Surakarta. Sekolah inklusi yang berada di bawah UPT PLDPI berjumlah 19 sekolah Jenjang SD, 10 sekolah jenjang SMP dan 5 sekolah jenjang SMA/SMK. Mitra berada di Kota Surakarta yang merupakan kota ramah anak dan kota inklusi sejak tahun 2013. Fokus Program Pengabdian ini sekolah inklusi jenjang SD di Kota Surakarta memiliki jumlah yang paling banyak dengan jumlah sekolah yaitu 16 sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) per tahun 2022 adalah 280 peserta didik ABK. Dengan ini permasalahan mitra menjadi sangat kompleks salah satunya yang dikeluhkan adalah masalah ketersediaan Guru Pendamping Khusus di Sekolah Inklusi jenjang SD. Dengan adanya masalah tersebut pihak pengusul pengabdian kepada masyarakat internasional dan mitra bekerjasama untuk memberikan kesempatan mahasiswa UNS semester 5 bisa magang selama 1 bulan sebagai *supporting* GPK di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta. Hal ini akan mengatasi masalah mitra yaitu PLDPI juga untuk menjalankan aturan PERWALI dalam memberikan layanan yang optimal bagi ABK di Kota Surakarta. Untuk mengatasi kesenjangan dalam penyediaan GPK tersebut, maka melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sangat dimungkinkan dapat diatasi dengan melibatkan mahasiswa yang memenuhi syarat melalui Program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi yang selanjutnya disingkat dengan MAPING-AKSI sebagai wujud program magang. Program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta dilaksanakan untuk dalam tahapan tiga tahap yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan mitra, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

**Kata Kunci :** anak berkebutuhan khusus, mahasiswa pendamping, sekolah inklusi

### PENDAHULUAN

Upaya pemerintah melegitimasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, semakin membuka peluang untuk memperluas kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan yang baik tidak diimbangi dengan kesiapan sekolah yang direkomendasikan untuk menyediakan fasilitas belajar dan dukungan sumber

daya yang memadai (Efendi, 2018). Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan yang lebih optimal dari guru pembimbing khusus (GPK), namun kenyataan di lapangan pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus masih belum optimal (Marza, et al., 2023).

Pelaksanaan pendidikan inklusi di daerah ini cukup memuaskan karena banyak sekolah negeri maupun swasta yang menerapkan pendidikan inklusi. Namun kenyataannya, masih banyak sekolah yang secara fungsional belum siap melaksanakan pendidikan inklusi.

Hal ini dapat diamati di beberapa sekolah daerah di Indonesia. Kendala yang paling sering ditemui adalah pemahaman pendidik dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus (Nuphanudin, et al., 2021). Beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan inklusi tidak dapat berjalan optimal, yaitu kurangnya pemahaman guru tentang perubahan kurikulum pendidikan inklusi. (Muh dan Uslan, 2020), infrastruktur yang kurang (Kurniawati, Setyaninrum dan Astutik, 2021), kurangnya guru pendidikan khusus untuk guru pembimbing khusus (Putri, Miarakhman dan Krisnawati, 2020), dan sistem penilaian ujian nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus masih sama dengan peserta didik reguler (Faridi, 2020), dan tidak ada standar standar penilaian untuk siswa tersebut (Alhaddad, 2020).

Guru pembimbing khusus (GPK) memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Kemampuan Guru pembimbing khusus bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain orangtua dan guru kelas berpengaruh pada pendidikan inklusif berkualitas tinggi (Nurhayati, et al., 2023). Berdasarkan data penelitian, hanya ada 13% pendidik di lingkungan pendidikan khusus. Dengan demikian, anggota masyarakat dan orang tua diharapkan untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang berkualitas (Moberg, et al., 2020).

Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Surakarta merupakan UPT yang membawahi layanan sekolah inklusi di Surakarta. Sekolah inklusi yang berada di bawah UPT PLDPI berjumlah 16 sekolah Jenjang SD, 10 sekolah jenjang SMP dan 5 sekolah jenjang SMA/SMK. Mitra berada di Kota Surakarta yang merupakan kota ramah anak dan kota inklusi sejak tahun 2013. Fokus Program Pengabdian ini sekolah inklusi jenjang SD di Kota Surakarta memiliki jumlah yang paling banyak dengan jumlah sekolah yaitu 16 sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) per tahun 2022 adalah 280 peserta didik ABK. Dengan ini permasalahan mitra menjadi sangat kompleks salah satunya yang dikeluhkan adalah masalah ketersediaan Guru Pendamping Khusus di Sekolah Inklusi jenjang SD. Pada sekolah tersebut memiliki total Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebanyak 80 guru yang terdaftar sebagai pegawai kontrak Kota Surakarta. Rasio antara Anak Berkebutuhan Khusus dengan GPK adalah 4 : 1. Hal ini menyebabkan layanan di sekolah inklusi pada jenjang SD masih sangat jauh dari layak dimana empat ABK ditangani satu GPK yang standarnya satu ABK adalah satu GPK atau satu GPK menanggapi dua ABK.

Rasio tersebut menyebabkan banyak peserta didik ABK yang tidak terlayani dengan baik di sekolah inklusi jenjang SD. Kehadiran GPK sangat membantu proses belajar ABK di kelas (Rokhim, et al., 2021). Peran GPK

tidak hanya sebagai guru yang mendampingi, tetapi juga sebagai terapis dan orangtua yang mengurus segala kebutuhan siswa, baik ketika di dalam dan luar kelas (Butt & Lowe, 2012). Selain itu, kehadiran GPK juga mempermudah anak untuk memahami pelajaran yang disampaikan guru kelas (Fitri, 2022). Guru pembimbing bagi ABK membutuhkan kemampuan yang khusus, hal ini dikarenakan ABK berbeda dengan anak reguler lainnya (Fitri, 2022). ABK mempunyai banyak hambatan, antara lain menurunnya kondisi fisik, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi dan menurunnya kondisi sosial dan emosional (Ogundele, 2018). Ormrod mengembangkan 11 kategori khusus dari lima kategori umum siswa berkebutuhan khusus, yaitu ADHD, gangguan emosi dan perilaku, keterbelakangan mental, gangguan penglihatan, ketidakmampuan atau hambatan yang parah dan majemuk, kesulitan belajar, gangguan bicara dan komunikasi, gangguan spektrum autisme, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan pendengaran, dan keberbakatan (Ormrod, 2011). Oleh karenanya, dibutuhkan GPK yang berkualitas agar dapat mengembangkan potensi ABK secara maksimal (Rasmitadila & Goldstein, 2017).

Kebutuhan GPK yang sesuai dengan kompetensi untuk mendidik mendesak di lapangan menyebabkan banyak peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Regulasi yang sulit

untuk pengangkatan GPK menjadi pegawai TKPK (Tenaga Kontrak Perjanjian Kerja) ini menjadi kendala dalam menambah jumlah GPK di sekolah inklusi jenjang SD dan SMP di Kota Surakarta. PDLPI yang membawai sekolah inklusi di jenjang SD ini mencoba melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terdekat yang memiliki SDM untuk mengatasi masalah ini yaitu Universitas Sebelas Maret. Hal ini menjadi peluang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, dimana mahasiswa S1 UNS khususnya prodi Psikologi, Pendidikan Luar Biasa, PJOK dan Bimbingan Konseling dapat mengabdikan melalui program magang di sekolah inklusi jenjang SD yang mengalami kekurangan GPK.

Dengan program ini diharapkan mahasiswa yang sudah diberikan pembekalan dan memiliki kompetensi mengajar ABK dapat menjadikan kesempatan ini untuk melakukan kegiatan MBKM. Jumlah mahasiswa yang banyak yang tidak terikat oleh tuntutan honor untuk mengajar menjadi sebuah solusi yang akan menjadi program pengabdian kepada masyarakat secara berkala setiap tahun untuk magang di sekolah inklusi jenjang SD di Kota Surakarta. Dengan adanya program kerjasama ini mahasiswa memiliki kesempatan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan selama 5 semester di Sekolah inklusi jenjang SD. Program ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *supporting* GPK dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi

ABK di Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta.

## METODE

Program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta yang dilaksanakan tahun 2023. Program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta dilaksanakan untuk dalam tahapan yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan mitra, sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Kegiatan Pengabdian

### Tahap Persiapan

Pada tahap ini merupakan tahap pertama untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra. Pada tahap ini diawali dengan pemetaan kebutuhan GPK di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta. Kegiatan pemetaan melibatkan peran mitra yaitu PLDPI untuk menyediakan data jumlah GPK dan jumlah ABK di Sekolah Dasar Inklusi. Hasil pemetaan kebutuhan GPK akan dijadikan dasar untuk menyiapkan mahasiswa yang akan membantu GPK mendampingi ABK di sekolah inklusi yang mengalami kebutuhan GPK yang

banyak data yang disajikan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, pembuatan buku panduan program MAPING-AKSI sebagai standarisasi bagi mahasiswa yang akan magang di sekolah inklusi memiliki kompetensi yang dibutuhkan di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta. Pada kegiatan terakhir tahap persiapan adalah penyiapan dan pembekalan mahasiswa untuk diterjunkan di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta berdasarkan kebutuhan. Mahasiswa akan dibagi berdasarkan jumlah sekolah yang membutuhkan *supporting* untuk mendampingi ABK. Dalam hal ini pihak mitra berkontribusi dalam menentukan materi panduan dan pembagian mahasiswa di Sekolah Dasar Inklusi yang mengalami kekurangan GPK.

### Tahap Pelaksanaan

Pada tahap yang kedua ini adalah tahap pelaksanaan pengabdian program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta. Tahap ini sudah mulai mempraktekan program MAPING-AKSI sesuai dengan panduan yang telah disusun sebagai wujud dari program magang di Sekolah Dasar inklusi. Mahasiswa sudah berada di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta untuk mendampingi ABK sebagai *supporting* GPK dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pserat didik. Program magang dilaksanakan mahasiswa sebagai wujud MBKM dalam kurun waktu 1 bulan di Sekolah Dasar Inklusi

Kota Surakarta. Peran mitra dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi mahasiswa kepada sekolah untuk melaksanakan program pendampingan ABK.

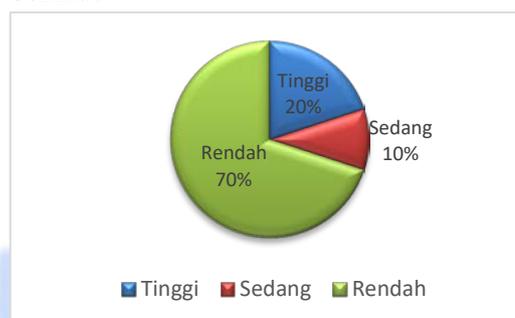
#### **Tahap Evaluasi dan Pelaporan**

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pelaporan kegiatan pengabdian program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta. Tahap ini akan dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan program yang telah dilaksanakan mahasiswa selama mendampingi ABK di Sekolah Inklusi. Evaluasi dilakukan mitra dan pihak Perguruan Tinggi untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dialami mahasiswa dalam program Mahasiswa Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebagai *supporting* Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Kota Surakarta. Hal ini akan menjadi dasar pada keberlanjutan rogram kerjasama pengabdian ini selalu lebih baik dari tahun ke tahun. Mahasiswa diharapkan membuat pelaporan kegiatan pengabdian yang dijadikan dasar pemberian rekognisi program MBKM pada mata kuliah yang diambil mahasiswa. Pihak mitra akan memberikan nilai sesuai dengan pelaporan dan pelaksanaan pendampingan yang dilakukan mahasiswa di Sekolah Dasar Inklusi Kota Surakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap pertama ini dilakukan pemetaan tentang kompetensi dan kebutuhan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi Kota Surakarta. Kondisi saat ini kompetensi GPK di kota Surakarta dari data PLDPI sebagai berikut:



Gambar 2. Kompetensi GPK Jenjang SD Inklusi Kota Surakarta

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2016) menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya jumlah GPK serta kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK. Permasalahan kompetensi GPK yang kurang ini diakibatkan oleh latar belakang pendidikannya yang non-PLB. Data dari PDLPI Kota Surakarta menjelaskan jumlah GPK yang memiliki latar belakang PLB saat ini tercatat 26 guru dan 56 GPK bukan berlatar belakang PLB. Adapun keberadaan GPK berasal dari pendidikan luar biasa (PLB) juga sangat membantu siswa inklusif dalam memahami materi pelajaran agar keterserapannya juga sama dengan anak reguler.

Hasil pemetaan GPK di Kota Surakarta menunjukkan data sebanyak 167 guru yang menanggapi 675 peserta didik berkebutuhan khusus dengan perbandingan 1: 4. Hal ini tidak ideal seharusnya 1 GPK menanggapi paling

banyak 2 peserta didik berkebutuhan khusus. Sebaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan GPK jenjang SD di sekolah inklusi di kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran ABK dan Guru Pembimbing Khusus di SD Inklusi Kota Surakarta

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ABK	JUMLAH GPK
1	SD Negeri Nayu Barat II	38	1
2	SDN Pringgolayan	18	1
3	SDN Manahan	15	1
4	SDI AL-ISLAM	5	1
5	SDN Kartodipuran	26	2
6	SDN KARANGASEM I	5	1
7	SD Lazuardi Kamila GCS	31	12
8	SDN Pajang 1	15	4
9	SDN. Ngemplak	15	0
10	SDN Harjodipuran	9	0
11	SD N MOJOSONGO I	5	1
12	SD Al-Islam 2 Jamsaren	30	1
13	SDN Carangan	3	1
14	SDN Wiropaten	12	1
15	SDN Petoran	13	0
16	SDN Bromantakan	23	7
18	SDN Gebang	36	3
19	SD Al Firdaus	58	49
21	SD Tripusaka	1	1
22	SD Charis	21	5
<b>Total</b>		<b>379</b>	<b>91</b>

Hasil pemetaan jumlah GPK di Sekolah Inklusi Kota Surakarta menunjukkan kebutuhan *supporting* dalam pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus terlebih di sekolah yang berlabel negeri terdapat sekolah yang tidak memiliki GPK untuk menanggapi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini salah satunya dengan bantuan perguruan tinggi sekitar yaitu UNS untuk menerjunkan mahasiswanya magang

menjadi GPK di sekolah inklusi Kota Surakarta melalui program MBKM.

#### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dilakukan dengan seleksi mahasiswa yang mengikuti magang MBKM di sekolah inklusi. Pada masa pendaftaran terdapat 68 mahasiswa semester 5 yang dilakukan seleksi untuk dipilih menjadi 30 mahasiswa yang akan diterjunkan di sekolah inklusi Kota Surakarta yang membutuhkan *supporting* GPK yang berasal dari prodi Pendidikan Luar

Biasa, PJOK, Bimbingan Konseling dan Psikologi UNS. Mahasiswa yang terpilih mendapat pelatihan dan pembekalan dari dosen Universiti Kebangsaan Malaysia, tim dosen Pendidikan Luar Biasa dan Psikologi serta dari pihak PLDPI Kota Surakarta selama 4 hari. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan dan sebagai wawasan baru tentang pendidikan inklusi baik di Malaysia maupun Surakarta. Dalam pelatihan mahasiswa diberikan buku panduan pendampingan anak berkebutuhan khusus dan 10 modul untuk memahami dan menangani peserta didik di sekolah inklusi.

Proses selanjutnya mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan dan pembekalan akan diterjunkan ke sekolah inklusi yang ditunjuk oleh PLDPI Kota Surakarta. Para mahasiswa akan magang selama 1 bulan yang diharapkan bukan hanya membantu GPK mengajar peserta didik berkebutuhan khusus tetapi dapat mentransfer ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan dan pelatihan tentang cara menangani peserta didik berkebutuhan khusus.



Gambar 3. Foto Kegiatan Pelatihan dan Pembekalan



Gambar 4. Buku Panduan Mahasiswa Pendamping ABK di Sekolah Inklusi (MAPING AKSI)

### Tahap Evaluasi

Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja mahasiswa magang MBKM yang diterjunkan di sekolah inklusi Kota Surakarta. Evaluasi kinerja dilihat dari paparan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang yang telah menyiapkan bahan presentasi kegiatan dan logbook selama menjalani kegiatan magang selama 1 bulan. Penilaian yang dilakukan dengan visit ke sekolah inklusi yang dilakukan oleh di pengabdian dan pihak mitra PLDPI untuk mengetahui kinerja mahasiswa magang di lapangan.

Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar dalam memberikan rekognisi mata kuliah bagi mahasiswa dan kelebihan SKS akan masuk dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dalam proses evaluasi ini mahasiswa magang diberikan kesempatan memberikan hambatan selama menjalani magang di sekolah inklusi Kota Surakarta yang akan dijadikan ebagai bahan evaluasi program magang berikutnya.

## PENUTUP

### Simpulan

Pelaksanaan program pengabdian dilakuakn dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengabdian yang dimulai dari proses persiapan yang menghasilkan kompetensi dan pemetaan kebutuhan GPK di sekolah Inklusi Kota Surakarta. Dalam studi yang sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas Gpk di kompetensi dan pemetaan kebutuhan GPK di sekolah Inklusi Kota Surakarta. Hal ini menjadi dasar dilakukan pengabdian magang di sekolah inklusi bagi mahasiswa UNS melalui jalur MBKM yang dimana mahasiswa ditugaskan di sekolah inklusi sebagai supporting bagia GPK di sekolah inklusi Kota Surakarta selama 1 bulan. Mahasiswa yang terpilih berjumlah 20 mahasiswa diberikan fasilitas pelatihan dan pembekalan sebelum diterjunkan di lapangan yang diberikan oleh dosen Universiti Kebangsaan Malaysia, tim dosen, Pendidikan Luar Biasa dan Psikologi, serta dari pihak mitra PLDPI Kota Surakarta.

### Saran

Pada perjalanan program pengabdian perlu adanya pembenahan kedepannya seperti penambahan jumha mahasiswa magang dan lama waktu magang dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Hal ini dimaksudkan agar dapat terjadi transfer pengetahuan dalam antara mahasiswa magang dan guru sekolah inklusi yang ditunjuk pihak PLDPI Kota Surakarta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddad, M. R. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 21–30.
- Butt, R, and Lowe, K. (2012). Teaching Assistants and Class Teachers: Differing Perceptions, Role Confusion and The Benefits Of Skills-Based Training. *International Journal of Inclusive Education*, 6 (2), 207-219
- Efendi, M. (2018). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality. *Journal of ICSAR*, 2(2), 142-147.
- Faridi, F. (2020). Urgensi Pendidikan Inklusif: Studi Kasus Pada Kegiatan ‘B’ Religi’ di SMA Negeri 3 Kota Malang. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), pp. 119–127.
- Fitri, A. Z. (2022). Inclusive Education Curriculum Management with Modification Humanistic Design. *Journal of Social Studies*

- Education Research*, 13 (3),150-173.
- Kurniawati, H., Setyaninrum, I. R., & Astutik, F. A. (2021). Desain Pendidikan Inklusi Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di PG TK Alam PATRICK Depok. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 180–192.
- Marza, R. A., Nasien, D., & Purwanto, A. J. (2023). Teacher's Role: Learning Service of Children with Special Needs in Inclusive School. *Journal of Psychology and Instruction*, 6 (3), 170-180.
- Moberg, S., Muta, E., Korenaga, K., Kuorelahti, M., & Savolainen, H. (2020). Struggling for Inclusive Education in Japan and Finland: Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education. *European Journal of Special Needs Education*, 35(1), 100-114.
- Muh, A. S., & Uslan, U. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Abdi Kasih Bangsa. *Musamus Journal of Primary Education*, 2(2), 102–112.
- Nuphanudin., Komariah, A., Kurniady, D., Hana, C., Pawening, N., Nabilah, T., & Madjid, P. (2021). Supervision and Evaluation of Inclusive Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 1440-1451.
- Nurhayati., Satispi, E., Izzatusolekha., & Salam, R. (2023). Implementation of Inclusive Education Policies in the City of Tangerang Selatan. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 6(2), 1–17.
- Ogundele M. O. (2018). Behavioural and Emotional Disorders in Childhood: A Brief Overview for Paediatricians. *World Journal of Clinical Pediatrics*, 7(1), 9–26.
- Ormrod, J.E. (2011). *Psikologi Pendidikan Jilid I*. Jakarta : Penerbit. Erlangga.
- Putri, Z. F., Miarakhman, N. F., & Krisnawati, R. D. (2020). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 2 Yogyakarta. *Khazanah Intelektual*, 4 (3), 932-953.
- Rasmitadila, R., & Goldstein, B. (2017). The Role of Special Assistant Teacher to Help Special Needs Student Through Instructional Interactions in an Inclusive Classroom. *International Journal of Special Education*, 32 (3), 485-506.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *Humanitas*, 13 (1), 50 – 61.
- Rokhim, A., Suryadi, S., & Supadi, S. (2021). Evaluation of The Implementation of The Inclusion Program. *International Journal of Elementary Education*, 5(4), 675–684.